

## PEMETAAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA

Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis negara-negara di dunia. Hal ini dapat dilihat dalam deklarasi PBB pada program Millennium Development Goals (MDGs) dan berlanjut pada Sustainable Development Goals (SDGs). Ada dua pendekatan dalam menentukan garis kemiskinan, yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Menurut sifatnya, kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan sementara (*transient poverty*) dan kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*). Penduduk yang tergolong miskin sementara adalah mereka yang pengeluaran rumah tangganya berada di bawah garis kemiskinan. Situasi perekonomian memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan status ekonomi tersebut. Sementara kemiskinan ekstrem adalah kondisi kemiskinan dengan tingkat penghasilan di bawah garis kemiskinan internasional yaitu USD 1,9 per hari.

Merujuk pada data BPS, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 10,4 juta jiwa atau 3,8% dari total populasi di Indonesia. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 9,9 juta jiwa atau 3,7% dari total populasi (BPS, 2020). Tentunya hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya pandemi Covid-19 yang telah memotong tren penurunan kemiskinan dari tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, World Bank menyatakan salah satu hal

esensial yang dapat dilakukan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan peluang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat miskin<sup>1</sup>. Pertumbuhan semacam ini melibatkan penambahan nilai produk pertanian yang diproduksi orang miskin atau menghasilkan pekerjaan yang lebih baik.

Terkait dengan menghasilkan pendapatan yang lebih baik, masyarakat Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pengusaha atau UMKM. UMKM dapat mempekerjakan hingga 119,5 juta pekerja, yakni sekitar 96,92 persen dari total tenaga kerja tahun 2019 (Aviliani, 2021). Hal ini membuktikan bahwa sektor ini dapat menyerap tenaga kerja secara masif dan menjadi wadah untuk masyarakat berpendapatan rendah untuk dapat produktif.

Program pemerintah untuk mendukung UMKM terutama di masa pandemi sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah Masterplan Revitalisasi UMKM. Revitalisasi ini bertujuan untuk mempercepat eksekusi program relaksasi bagi UMKM yang kesulitan. Relaksasi bagi UMKM diberikan dengan cara memberikan kemudahan terhadap pelaku UMKM antara lain: 1) Subsidi Bunga, 2) Penundaan Pembayaran Pokok dan Penambahan Modal Kerja. Selain revitalisasi bagi UMKM, Bappenas menyusun skema baru terkait pembiayaan diantaranya: 1) Pembiayaan Investasi, 2) Modal Kerja, 3)

<sup>1</sup> World Bank. (2016). Ending Extreme Poverty. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/08/ending-extreme-poverty>.

Meningkatkan Kemudahan Proses Pengajuan<sup>2</sup>.

Merujuk kembali kepada World Bank, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem adalah dengan meningkatkan nilai produk pertanian dan perikanan<sup>3</sup>. Bappenas saat ini sudah memiliki rencana terkait hal ini, yaitu dengan melakukan Grand Desain Transformasi Ekonomi. Program ini diperuntukkan khusus petani dan nelayan, dua profesi yang rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Terkait hal ini, perlu dilakukan uji coba model bisnis korporasi pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan taraf hidup pelaku usaha tersebut. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi atas model bisnis korporasi yang tepat bagi petani atau korporasi nelayan, model tersebut dapat dijadikan *benchmark* sehingga bisa diterapkan di seluruh penjuru Indonesia.

Setelah menjadi *benchmark*, BUMN dan BUMD dilibatkan dalam mendampingi korporasi petani dan korporasi nelayan. Hal ini bertujuan untuk membangun sebuah ekosistem usaha yang terintegrasi dengan sistem perbankan, serta tersambung dengan inovasi-inovasi teknologi, dan perbaikan dari sisi manajerial. Kekurangan dari program ini adalah belum ada ekosistem dan model bisnis yang cukup optimal serta diterapkan di seluruh provinsi Indonesia. Diharapkan dengan adanya model bisnis korporasi dan pendampingan dari berbagai pihak, masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem dapat

memiliki kesempatan untuk lepas dari kemiskinan ekstrem.

Peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem memang penting, namun penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem tidak sampai di situ saja. Perlu diingat bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan struktural. Oleh karena itu, Pemerintah juga harus menyiapkan langkah pencegahan atau mitigasi berupa jaring pengaman. Dalam mempersiapkan jaring pengaman, Pemerintah sudah menyiapkan program Reformasi Perlindungan Sosial dan Reformasi Ketahanan Bencana. Kedua program ini berfokus pada pendataan penduduk sesuai dengan tingkat kerentanannya dan juga skema pembiayaan. Kelemahan program ini adalah harus didampingi oleh basis data kependudukan yang terintegrasi (*single identity number*) mengikuti dinamika perpindahan penduduk dan ekonomi masyarakat agar program yang berkaitan dengan jaring pengaman dapat tepat sasaran.

Berbagai program dan strategi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia sebetulnya telah mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Akan tetapi, diperlukan program pengentasan kemiskinan yang bersifat struktural dan sistematis dalam mencapai target tersebut. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi kebijakan Pemerintah merupakan salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan

<sup>2</sup> Bappenas. (2021). Outstanding Issues yang Menjadi Perhatian Menteri PPN/Kepala Bappenas. Paparan Presentasi

<sup>3</sup> World Bank. (2016). Ending Extreme Poverty. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/08/ending-extreme-poverty>.

program pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.

Pengentasan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara sinergis karena akar permasalahan yang dihadapi kompleks dan multidimensi, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya hingga akses dalam mendapatkan standar hidup yang layak. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup dalam kategori tersebut tidak memahami perbedaan keuntungan dari kepemilikan lahan dan kondisi rumah layak. Banyak masyarakat yang tergolong miskin ekstrem tidak mempersalahkan tinggal dan hidup di kondisi rumah tidak layak. Bagi mereka, kepemilikan lahan lebih penting karena lahan dapat memberikan penghasilan, lain halnya dengan kepemilikan rumah. Perspektif dan pola pikir inilah yang harus mampu ditangkap oleh Pemerintah dalam memformulasikan kebijakan yang bertujuan untuk menyejahterakan dan mengeluarkan mereka dari kondisi kemiskinan ekstrem.

Dari pemetaan di atas secara umum Pemerintah dapat berfokus untuk melakukan pengarusutamaan pengentasan

kemiskinan ekstrem dengan program yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan jaring pengaman sosial. Meski demikian, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ego sektoral dari setiap K/L dan pengarusutamaan kemiskinan ekstrem dalam program-program di atas. Tantangan kelembagaan tersebut dapat dijawab dengan pendekatan komprehensif melalui penguatan Bappenas sebagai *clearing house* dari Kementerian/Lembaga sebagai perencana utama untuk melakukan pengarusutamaan topik pengentasan kemiskinan ekstrem di setiap program kerja Kementerian teknis dengan rencana/program yang bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemetaan awal ini diharapkan dapat menjadi landasan pendalaman atas *outstanding issue* Bappenas 2020-2024 ataupun program-program di setiap Kementerian/Lembaga yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan adanya penyebutan tersebut, rencana yang dibangun juga diharapkan dapat berpihak pada upaya-upaya yang lebih konkrit pada masyarakat miskin ekstrem.

Penulis: Gusti Raganata, MPP

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja

Email: raganatagusti@gmail.com

**Mohon untuk mengisi kuesioner tanggapan atas kajian di atas dengan mengklik tautan berikut:**

<https://bit.ly/PetaSolusiKemiskinanEkstrem>

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-  
penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html)

Bappenas. (2021). Outstanding Issues yang Menjadi Perhatian Menteri PPN/Kepala Bappenas. Paparan Presentasi

Jeffrey Sachs, (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for our Time*. New York: The Penguin Press.

Kumparan. (2021). Jokowi ingi pertumbuhan Ekonomi RI Merata di Desa dan Kota. [https://kumparan.com/kumparanbisnis/jokowi-ingin-pertumbuhan-ekonomi-ri-merata-di-desa-dan-  
kota-1vg7gS1JBff](https://kumparan.com/kumparanbisnis/jokowi-ingin-pertumbuhan-ekonomi-ri-merata-di-desa-dan-kota-1vg7gS1JBff). Diakses 18 Mei 2021

Kontan. (2021). Dampak Corona Bappenas Lakukan Reformasi Sosial dengan Mendesai Ulang Tiga Hal ini. [https://nasional.kontan.co.id/news/dampak-corona-bappenas-lakukan-reformasi-sosial-  
dengan-mendesain-ulang-tiga-hal-ini](https://nasional.kontan.co.id/news/dampak-corona-bappenas-lakukan-reformasi-sosial-dengan-mendesain-ulang-tiga-hal-ini). Diakses 18 Mei 2021

McCulloch, N. and Calandrino, M. (2003) Vulnerability and chronic poverty in rural Sichuan, *World Development* 31 (3): 611–28.

Moeliono, M., Limberg, G., Gönner, C., Wollenberg, E. dan Iwan, R. (2007). *Menuju Kesejahteraan: Pemantauan Kemiskinan di Malinau, Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia. 78p.

Merdeka. (2021). Bappenas Dapat Tugas Buat Master Plan Masa Depan UMKM. [https://www.merdeka.com/uang/bappenas-dapat-tugas-buat-master-plan-masa-depan-umkm-  
indonesia.html](https://www.merdeka.com/uang/bappenas-dapat-tugas-buat-master-plan-masa-depan-umkm-indonesia.html). Diakses 18 Mei 2021.

Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Usulan Perbaikan*.

Tempo. (2021). Jokowi: Model Bisnis Korporasi dan Nelayan Belum Berjalan Optimal. [https://bisnis.tempo.co/read/1393357/jokowi-model-bisnis-korporasi-petani-dan-nelayan-belum-  
berjalan-optimal](https://bisnis.tempo.co/read/1393357/jokowi-model-bisnis-korporasi-petani-dan-nelayan-belum-berjalan-optimal). Diakses 18 Mei 2021

World Bank. (2016). *Ending Extreme Poverty*. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/08/ending-extreme-poverty>. Diakses 18 Mei 2021.

World Bank. (2000). *Attacking Poverty*. World Development Report